



**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

**Adinda Mahardika
NIM 130810101044**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi ekonomi pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Adinda Mahardika
NIM 130810101044**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa terima kasih yang tidak terkira kepada:

1. Orang tua saya tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa dan cinta yang tidak pernah lelah;
2. Keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tidak ternilai dengan segala kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap.”
(Q.S. Al Insyirah: 5-8)

"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya."
(Alexander Pope)

“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri.”
(Aristoteles)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Adinda Mahardika

NIM : 130810101044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahaan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 17 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Adinda Mahardika
NIM 130810101044

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri

Nama Mahasiswa : Adinda Mahardika

NIM : 130810101044

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Disetujui Tanggal : 23 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E.,M.Si.
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KEDIRI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Adinda Mahardika

NIM : 130810101044

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Oktober 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. : (.....)
NIP. 19600412 198702 1 001

Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. : (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001

Anggota : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. : (.....)
NIP. 19700206 199403 1 002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Foto 4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., C.A.
NIP. 19710727 199512 1 001

Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri

Adinda Mahardika

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks dialami oleh setiap negara berkembang. Meningkatnya pengangguran bisa menjadi penghambat jalannya pembangunan dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Kediri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang meliputi kurun waktu tahun 1990-2015 tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), inflasi dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui pengaruh secara langsung dari masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), UMK, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Pengangguran, PDRB, UMK, Inflasi

Determinant Of Unemployment Rate In Kediri District

Adinda Mahardika

Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Jember University

ABSTRACT

The problem of unemployment is a very complex problem that is experienced by each developing country. Increasing of the unemployment can hindrance of developing country. The object of this study was to determine the effect of the Gross Regional Domestic Product, District/City Minimum Wage, and inflation on unemployment rate in Kediri District.

The data used in this research is time series data which cover the period of 1990-2015 about Gross Regional Domestic Product, District/City Minimum Wage, inflation, and open unemployment rate in Kediri East Java Province. Data analysis methods used in this study is multiple linear regression analysis, to determine the direct influence of each variable.

Based on the results of research and discussion about Determinan Unemployment Rate in Kediri District, it can be concluded that Gross Regional Domestic Product, District/City Minimum Wage, and inflation have a significant effect on the open unemployment rate in Kediri District.

Keyword: Unemployment, GRDP, Wage, Inflation

RINGKASAN

Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri; Adinda Mahardika; 130810101044; 2017: 63 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Masalah yang dialami oleh negara berkembang adalah masalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut karena penambahan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan kesediaan lapangan kerja yang dapat disediakan. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks, apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Kabupaten Kediri merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri yaitu sebesar 5,02 persen. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja masih kurang karena tingkat pengangguran masih cukup tinggi.

Angka pengangguran yang relatif tinggi di Kabupaten Kediri merupakan masalah penting dalam pembangunan ekonomi, hal ini karena variabel tersebut sebagai indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi makro di daerah tersebut. Sementara itu besaran tingkat upah yang berlaku, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), serta inflasi merupakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Metode regresi OLS bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri periode 1990-2015.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,096 dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif. Pada variabel UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000 dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif. Pada variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,044.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing, memberikan saran dan kritik, serta arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, memberikan saran dan kritik, serta arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
5. Ibu Regina Niken Wilantari S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan;
6. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya;

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Ibunda Kuntari dan Ayahanda Edi Setiyanto, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, kerja keras dan kasih sayang yang tak ternilai harganya yang telah diberikan. Segala bentuk pengorbanan telah dilakukan demi ananda. Terima kasih telah mendampingi ananda dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga ananda mampu menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan;
9. Adikku Sekar Kinasih, terima kasih atas segala kasih sayang yang saya jadikan sebagai semangat untuk terus maju;
10. Khrisnayu Indraswari yang selalu memberikan semangat kepada saya agar tidak menyerah untuk mengerjakan skripsi ini;
11. Teman-teman terbaik seperjuangan dalam pengerjakan skripsi Sayyari Ahadias Sari, Adelia Aprilianti, Dini Rahmawati, Fitri Khoirunnisa Shofura, Eka Wahyu Utami, Putri Ersya Rizki, Dzulfikar Addarda, Dwi Bagus, Agam Nurhardiansyah, Adrian Cahyo dan Wildan Aziz terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan kalian dalam segala hal sehingga meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya;
12. Muhammad Nur Huda, Ridho Ramadan, Prasetya Mahendra Putra, Fransisca Indah Sugianto, Richo Priva Argananta, Hendra Hadi Atullah, Nurma Kamelia Suryantoro, Halimatus Putria, Achmad Iqbal Pamungkas dan seluruh teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang memberikan kisah penuh warna selama masa kuliah;
13. Seluruh teman-teman KKN Kecamatan Kapongan yang telah memberikan pengalaman yang menarik selama KKN;
14. Seluruh teman-teman kost Sumber Alam F7;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2013;

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan bagi yang membacanya.

Jember, 17 Agustus 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Konsep Tenaga Kerja	8
2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja	10
2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja.....	12
2.1.4 Pasar Tenaga Kerja.....	13
2.1.5 Teori Pengangguran	15
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto	17
2.1.7 Teori Upah.....	19
2.1.8 Inflasi.....	21
2.1.9 Pengaruh Tingkat PDRB terhadap Tingkat Pengangguran.....	22
2.1.10 Pengaruh Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran.....	22
2.1.11 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran ...	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31

3.2 Unit Analisis	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Metode Analisis Data.....	31
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda	32
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.1 Uji Multikolinearitas	32
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	33
3.5.3 Uji Autokorelasi	33
3.5.4 Uji Normalitas	33
3.6 Uji Statistika.....	34
3.6.1 Uji F.....	34
3.6.2 Uji t.....	35
3.6.3 Koefisien Determinasi.....	36
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum.....	38
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	40
4.2.1 Gambaran Umum Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka..	40
4.2.2 Gambaran Umum Variabel PDRB	41
4.2.3 Gambaran Umum Variabel UMK	42
4.2.4 Gambaran Umum Variabel Inflasi	43
4.3 Analisis Data	44
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	44
4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	45
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.4.1 Uji Multikolinieritas	46
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	47
4.4.3 Uji Autokorelasi	47
4.4.4 Uji Normalitas	48
4.5 Uji Hipotesis	48
4.5.1 Uji F.....	48
4.5.2 Uji t.....	49
4.5.3 Koefisien Determinasi.....	50
4.6 Pembahasan.....	50
4.6.1 PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	50
4.6.2 UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	51
4.6.3 Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	52
BAB 5. PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPT Tiap Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.4 Hasil Uji White	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji F.....	48
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Uji t.....	49
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji R2	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri 1990-2015. (Sumber: BPS Kabupaten Kediri)	4
Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenagakerja (Sumber: Simanjuntak, 2001).....	10
Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja (Sumber : Simanjuntak, 2001)	12
Gambar 2.3 (a) Penawaran Tenaga Kerja (Sumber : Suparmoko, 2007).....	13
Gambar 2.3(b) <i>Backward Banding Curve</i> (Sumber : Suparmoko, 2007	13
Gambar 2.4 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja (Sumber : Simanjuntak, 2001).....	14
Gambar 2.5 Kurva kekakuan upah (Sumber: Salvatore, 2007)	20
Gambar 2.6 Kurva Hukum Okun (Mankiw, 2007)	22
Gambar 2.7 Kurva Philip (Salvatore 2007).....	23
Gambar 2.8 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kediri (Sumber : BPS Kabupaten Kediri, 2017)	38
Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Kediri tahun 1990 - 2015	40
Gambar 4.3 PDRB (Juta) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Kediri tahun 1990 - 2015	41
Gambar 4.4 UMK dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kediri tahun 1990 – 2015	42
Gambar 4.5 Inflasi (%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kediri tahun 1990 - 2015.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Rekapitulasi Data.....	58
Lampiran B. Statistik Deskriptif	59
Lampiran C. Analisis Regresi Linier Berganda	60
Lampiran D. Uji Asumsi Klasik.....	61
Lampiran E. Uji Hipotesis	63

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah melaksanakan pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke lima di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta orang pada tahun 2012, berarti merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar yang menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan (Subagiarta, 2012).

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan dalam mengukur perkembangan perekonomian di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, fokus permasalahan bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan secara riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita (Sukirno, 2008).

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Sukirno, 2008).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000).

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat (Sukirno, 2008).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Sukirno, 2008).

Gejala pengangguran dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (Boediono, 2013).

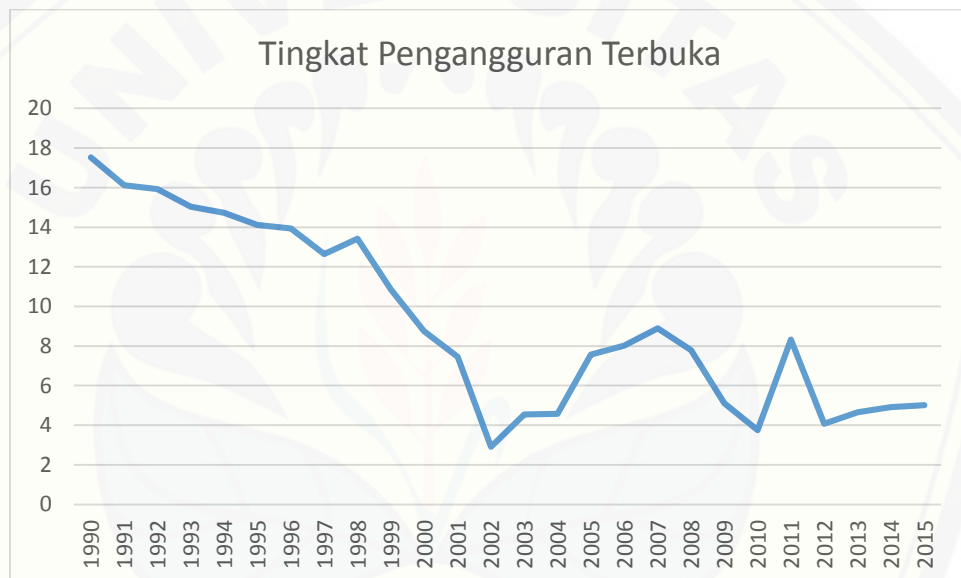
Di negara maju, tingkat penganggurannya biasanya berkisar antara 2-3 persen, hal ini disebut tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) (Sukirno, 2008).

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPT Tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Angkatan Kerja	TPT %
Pacitan	349.055	0.97
Ponorogo	496.443	3.68
Trenggalek	399.084	2.46
Tulungagung	565.151	3.95
Blitar	606.076	2.79
Kediri	785.650	5.02
Malang	1.273.597	4.95
Lumajang	514.666	2.60
Jember	1.157.462	4.77
Banyuwangi	841.190	2.55
Bondowoso	416.145	1.75
Situbondo	348.546	3.57
Probolinggo	601.353	2.51
Pasuruan	843.685	6.41
Sidoarjo	1.069.708	6.30
Nganjuk	553.405	4.05
Madiun	604.172	6.11
Magetan	534.007	2.10
Bojonegoro	362.786	5,01
Tuban	343.550	6.05
Lamongan	437.374	3.99
Gresik	628.363	5.01
Bangkalan	569.185	3.03
Sampang	611.621	4.10
Pamekasan	592.569	5.67
Sumenep	473.411	2,07
Kota Kediri	507.605	5.11
Kota Blitar	469.081	4.26
Kota Malang	622.460	2.07
Kota Probolinggo	145.426	4,01
Kota Pasuruan	69.365	3.80
Kota Mojokerto	423.631	4,88
Kota Madiun	113.522	4.01
Kota Surabaya	1.475.147	7,01
Kota Batu	64.630	4.29

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017

Kabupaten Kediri merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Seperti terlihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,02 persen dari jumlah angkatan kerja sebesar 785.650 di Kabupaten Kediri. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja masih kurang karena tingkat pengangguran masih cukup tinggi yaitu diatas 3 persen di Kabupaten Kediri. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seperti terlihat dalam gambar 1.1 berikut ini,



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri 1990-2015.
(Sumber: BPS Kabupaten Kediri)

Berdasarkan gambar 1.1 dalam kurun waktu 26 tahun dapat dilihat perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Pada tahun 1990 tingkat pengangguran terbuka sebesar 17,53 persen dan terus mengalami penurunan sampai di tingkat 2,91 persen pada tahun 2002. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2002 sampai tahun 2015 terus mengalami fluktuasi sampai akhirnya sebesar 5,02 persen pada tahun 2015. Rata-rata pengangguran di kabupaten Kediri selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 9,25 persen, dimana ini termasuk tingkat pengangguran yang tinggi karena berada di atas 3 persen.

Angka pengangguran yang relatif tinggi di Kabupaten Kediri merupakan masalah penting dalam pembangunan ekonomi, hal ini karena variabel tersebut sebagai indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi makro di daerah tersebut. Sementara besaran tingkat upah yang berlaku, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB, serta inflasi merupakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah PDRB. Dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, maka diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008).

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yaitu besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah merupakan pembayaran atau jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2002). Penetapan tingkat upah pada suatu wilayah memberikan dampak pengaruh terhadap pengangguran. Oleh karena itu semakin tinggi upah minimum maka akan mengurangi para pekerja sehingga akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Mankiw, 2007). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Namun dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. (Dharmayanti, 2011).

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Semua negara di dunia

selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Atas dasar pengangguran yang kompleks, peneliti mengambil judul “Determinan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kediri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri?
- b. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri?
- c. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum dari studi ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran. Secara rinci sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri;
- b. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri;
- c. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan informasi bagi para pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk mengembangkan ke topik lain
- b. Memberikan gambaran mengenai kondisi pengangguran di Kabupaten Kediri

- c. Memberikan sarana kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Kediri.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Tenaga Kerja

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Simanjutak, 2001). Sumber daya manusia atau sering disebut dengan human resources merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi.

Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko, 2007). Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjutak, 2001). Sedangkan menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

Konsep dari tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (*employed persons*) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang

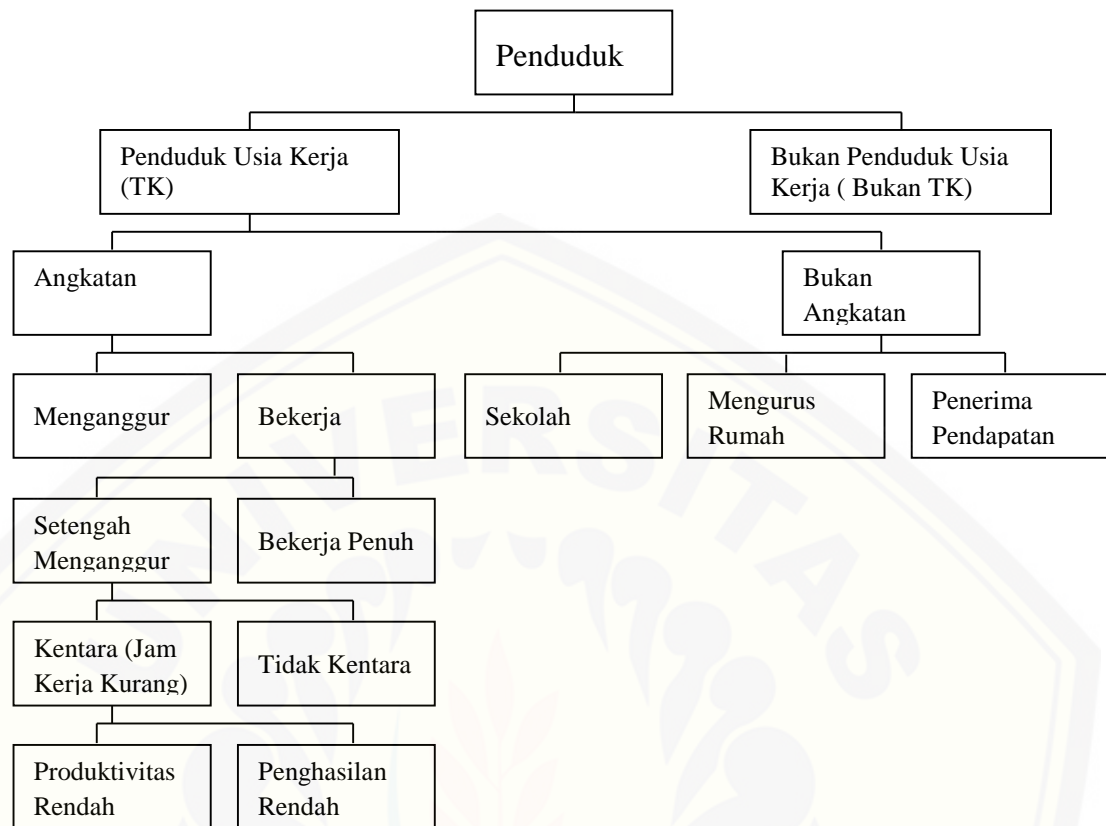
tergolong siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk di dalam golongan menganggur (Simanjuntak, 2001).

Menurut Simanjuntak (2001) kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yakni:

- a. golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah
- b. golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah
- c. golongan lain-lain, yang tergolong dalam lain-lain ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) Penerima pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan atau sewa atas milik
 - 2) Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

Pada dasarnya mereka yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja (kecuali yang terakhir yaitu mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain) sewaktu-waktu dapat terjun untuk ikut bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini juga disebutkan sebagai angkatan kerja potensial (*potential labor force*) (Simanjuntak, 2001)

Untuk memperjelas mengenai komposisi penduduk dan tenaga kerja, maka dibuat skema pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenagakerja (Sumber: Simanjuntak, 2001)

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

Simanjuntak (2001) menjelaskan tentang permintaan perusahaan atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang tersebut memberikan tingkat kepuasan (*utility*). Akan tetapi perusahaan memperkerjakan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa dengan maksud dijual kepada masyarakat dengan kata lain, penambahan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Perusahaan memerlukan sebuah dasar untuk menentukan menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan perlu memperkirakan tambahan hasil (*output*) yang diperoleh apabila menambah tenaga kerja. Tambahan hasil itu disebut tambahan hasil

marjinal atau *marginal physical product* dari tenaga kerja, disingkat menjadi MPP_L .

- b. Perusahaan menghitung jumlah pendapatan yang akan diperoleh dengan MPP_L tersebut. Jumlah pendapatan ini disebut penerimaan marjinal atau *marginal revenue* (MR). Jadi nilai *marginal revenue* sama dengan nilai MPP_L , yaitu besarnya MPP_L dikalikan dengan harga per unit (P), jadi persamaannya sebagai berikut :

$$MR = VMPP_L = MPP_L \times P$$

Dimana:

MR = *Marginal Revenue* (penerimaan marjinal)

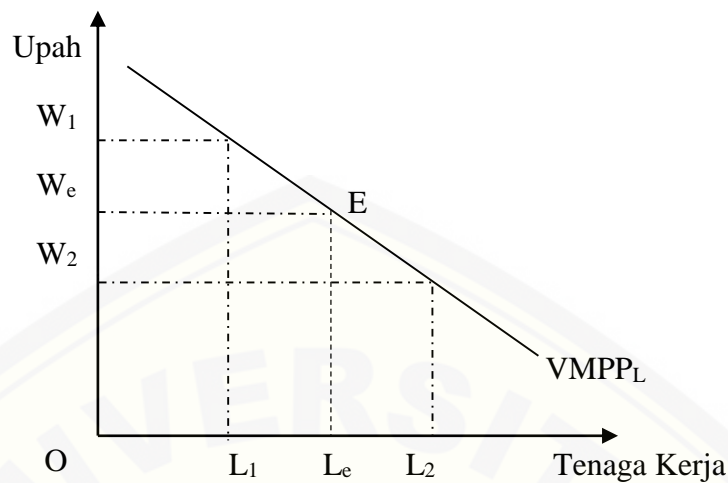
$VMPP_L$ = *Value Marginal Physical Product of Labor* (nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja)

MPP = *Marginal Physical Product*

P = Harga jual barang yang diproduksi per unit.

Menurut Simanjuntak (2001) Aspek lain yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari hubungan tingkat upah, MPP_L , harga barang dan jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan adalah bahwa sebagai reaksi terhadap peningkatan upah :

- Pengusaha menuntut peningkatan produktivitas kerja karyawan sedemikian rupa sehingga pertambahan produksi yang dihasilkan karyawan senilai dengan pertambahan upah yang diterimanya; atau bila ini tidak dapat terlaksana,
- Pengusaha terpaksa menaikkan harga jual barang; dan/atau
- Pengusaha mengurangi jumlah karyawan yang bekerja
- Pengusaha melakukan kombinasi dari dua di antara ketiga alternatif di atas atau kombinasi dari ketiganya



Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja (Sumber : Simanjuntak, 2001)

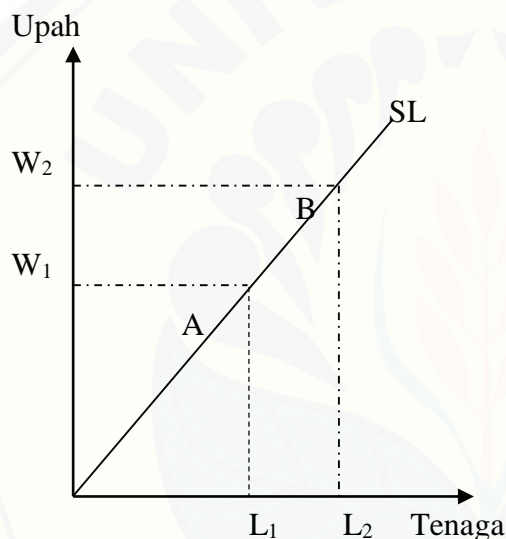
Gambar 2.2 menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja yang memiliki kemiringan (*Slope*) negatif. Kurva permintaan tenaga kerja tersebut menjelaskan hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva tersebut memiliki hubungan yang negatif, artinya bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diminta maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya jika tingkat upah yang diminta semakin rendah maka jumlah permintaan akan tenaga kerja meningkat.

2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja

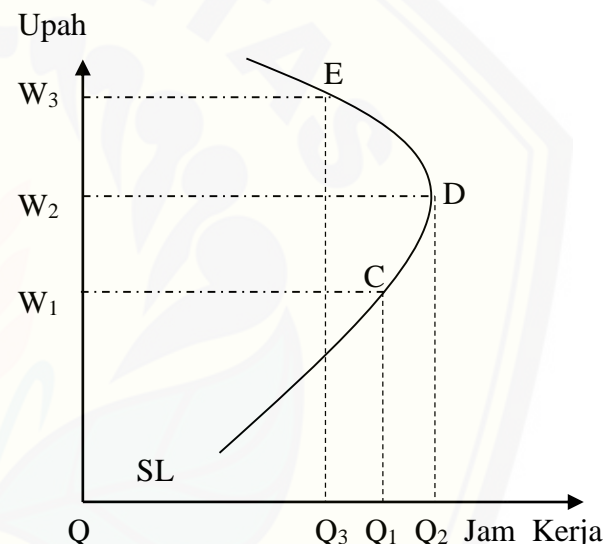
Menurut Simanjuntak (2001) tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia siap untuk bekerja, karena sebagian masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang siap untuk bekerja dan belum bersedia untuk bekerja dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi sosial dan ekonomi secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Suroto (1992) menjelaskan lebih lanjut mengenai persediaan tenaga kerja adalah istilah yang biasanya juga belum dihubungkan dengan faktor upah. Sedangkan dalam istilah penawaran tenaga kerja sudah turut dipertimbangkan

faktor upah. Dalam hal ini, pencari kerja bersedia menerima pekerjaan itu, atau menawarkan tenaganya apabila diberikan upah sekian rupiah setiap waktu.

Penawaran tenaga kerja berasal dari pemilik tenaga kerja atau buruh. Mereka mencari pekerjaan dengan cara menjual tenaga mereka. Sesuai dengan hukum penawaran maka pada tingkat upah yang tinggi akan banyak tenaga kerja yang ditawarkan, sedangkan pada tingkat upah yang lebih rendah akan lebih sedikit tenaga kerja yang ditawarkan (Suparmoko,2007). Dapat dikatakan, kurva penawaran tenaga kerja ini memiliki lereng yang positif, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 (a) Penawaran Tenaga Kerja
Sumber : Suparmoko, 2007

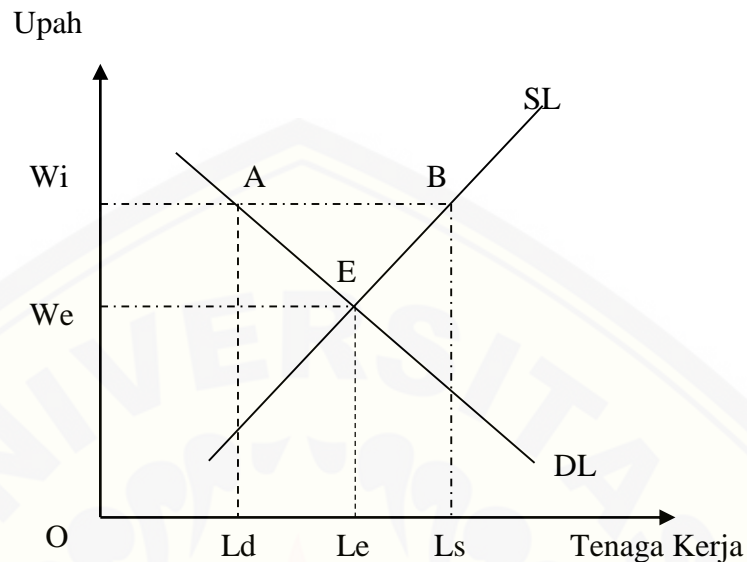


Gambar 2.3(b) Backward Banding Curve
Sumber : Suparmoko, 2007

2.1.4 Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerja. Dengan kata lain terjadi proses penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Pelaku-pelaku pasar kerja terdiri dari pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, pencari kerja, dan perantara atau penyalur tenaga kerja. Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk produksi, baik itu sedang bekerja atau, mencari pekerjaan. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor

kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh tingkat upah. (Simanjuntak, 2001).



Gambar 2.4 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja (Sumber : Simanjuntak, 2001)

Keseimbangan (*equilibrium*) merupakan suatu kondisi pasar yang sekali dicapai, cenderung untuk bertahan (Salvatore, 2007). Hal ini dapat terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada pasar tenaga kerja, keseimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, dan jumlah upah yang diminta sama dengan jumlah upah yang ditawarkan. Menurut Suroto (1992) permasalahan dalam pasar tenaga kerja dapat dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

- Masalah kelebihan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat ($S > D$).
- Masalah kekurangan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja kurang dari pada kebutuhan tenaga kerja ($S < D$).
- Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, akan tetapi terdapat sesuatu rintangan, keduanya tidak dapat bertemu pada tempat dan waktu yang

sama dikarenakan terdapat masalah yang terletak dalam mekanisme penyaluran ($S \neq D$).

- d. Masalah pada pasar kerja dapat terjadi baik sebelum memiliki atau masuk dalam pekerjaan yang disebabkan tidak sesuainya faktor pendapatan, kepastian keselamatan jasmani, perlakuan adil dan produktivitas kerja.

2.1.5 Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2002). Dalam pengertian makro ekonomi, pengangguran adalah sebagian dari angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro ekonomi, pengangguran adalah keadaan seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan (Suroto, 1992).

Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen (Simanjutak, 1998).

$$\text{Tingkat Pengangguran} = x = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut Simanjutak (1998), sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu:

- a. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian menentukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut. Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Pengangguran sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan pada permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Pengangguran siklikal ini diukur tidak adanya kecukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi. Pengangguran tersebut dikarenakan para pengangguran tidak melakukan pekerjaan yang bersifat mencari nafkah pada waktu mereka menganggur atau benar-benar tidak melakukan sesuatu kerja dalam keadaan menganggur.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Di luar musim panen dan turun ke sawah, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut menurut Edgar O.Edward (dalam Arsyad, 2010) mengklasifikasikan empat jenis pengangguran yaitu:

- 1) Pengangguran terbuka merupakan akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja maka berdampak pada semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan;

- 2) Setengah menganggur (*underemployment*) yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan;
- 3) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau sakit;
- 4) Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena sumber daya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.

Mankiw (2007) menyatakan, bahwa pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan pemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto sebagai nilai barang-barang jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dari suatu Negara selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun ditambah hasil produksi barang dan jasa yang berada pada konsumen tingkat akhir. Adapun nilai tambah yang terjadi merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tingkat akhir (Widodo,1990).

Menurut Deliarnov (1995), Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun tertentu.
- b. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Berikut ini terdapat tiga pendekatan cara menghitung Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan metode langsung (Tarigan, 2007) yaitu :

1) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran adalah penentuan pendapatan Regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total keseluruhan dari produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi:

- a) rumah tangga;
- b) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan;
- c) konsumsi pemerintah;
- d) pembentukan modal tetap bruto (investasi);
- e) perubahan stok;
- f) ekspor netto (total ekspor dikurangi total impor).

2) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi merupakan cara penentuan pendapatan regional yang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor prekonomian. Oleh karena untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai produksi dari masing-masing sektor tersebut.

3) Pendekatan Pendapatan

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

Produk domestik regional bruto dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

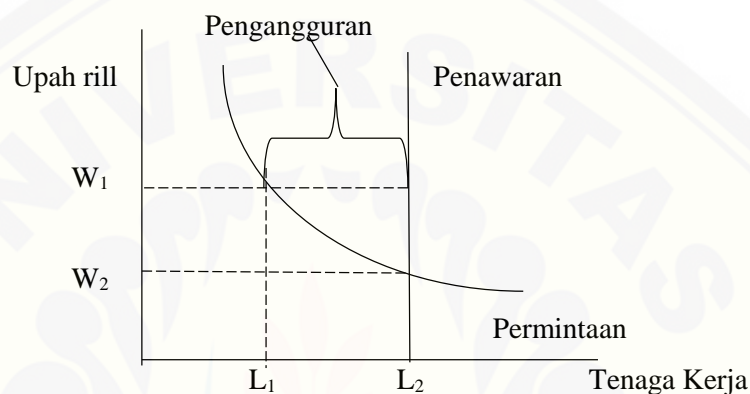
2.1.7 Teori Upah

Menurut Gilarso dalam Alghofari (2010), balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasanya yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan "upah" untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

Kebijakan dalam pemberlakuan dan peningkatan upah riil berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam masyarakat. Adanya tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tiap kota setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, disisi lain (pengusaha) justru berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan pengurangan

tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan berakibat berkurangnya tenaga kerja (Kurniawan, 2013).

Teori yang signifikan untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah mengenai teori kekakuan upah. Kekakuan upah adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.



Gambar 2.5 Kurva kekakuan upah (Sumber: Salvatore, 2007)

Berdasarkan gambar 2.5 asumsi bahwa penerapan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W_1) di atas tingkat keseimbangan yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Upah tidak akan turun ke W_2 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_1 . Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L_1 sehingga timbul pengangguran sebesar L_2 dikurangi L_1 (Salvatore dalam Kurniawan, 2013).

Dalam hal ini aspek upah menjadi penting, karena penghargaan (upah) akan menjadi efektif jika dihubungkan dengan kinerja secara nyata. Strategi upah yang efektif diharapkan dapat memberikan sumbangan pada terpeliharanya kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada (Salvatore dalam Kurniawan, 2013).

2.1.8 Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sering kali dijumpai di hampir tiap negara di dunia adalah inflasi. Salvatore (2007) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Menurut Sukirno (2008) berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Hal ini mengakibatkan permintaan masyarakat akan bertambah dengan pesat dan perusahaan – perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang terwujud akan menimbulkan kenaikan pada harga-harga.

b. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

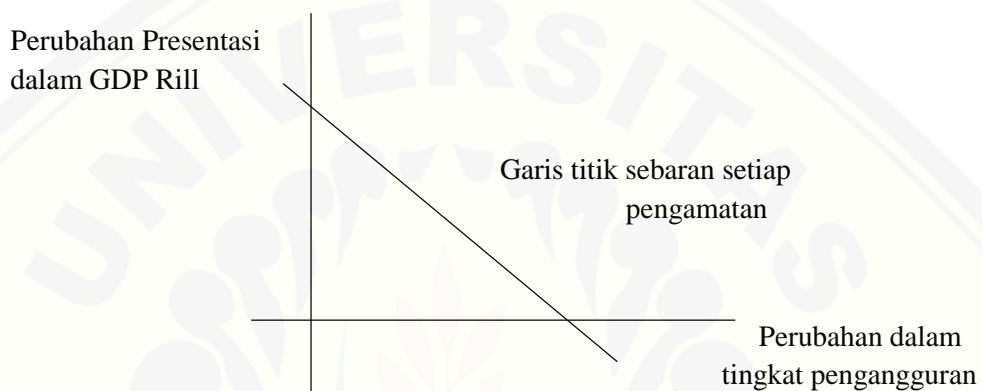
Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Penambahan biaya produksi akan mendorong peningkatan harga walaupun akan menghadapi resiko pengurangan terhadap permintaan barang yang diproduksinya. Inflasi ini akan berkaitan pada kenaikan harga serta turunnya produksi yang akan menimbulkan adanya resesi perekonomian.

Boediono (2005) menggolongkan inflasi menjadi 4 macam berdasarkan parah tidaknya inflasi tersebut.

- 1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- 4) Hiperinflasi (diatas 100% setahun)

2.1.9 Pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran

Menurut Arthur Okun menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP (*Gross Domestic Product*) riil, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil (Mankiw, 2007), seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.6 Kurva hukum okun (Sumber: Mankiw, 2007)

Gambar 2.6 merupakan titik sebar dari perubahan tingkat pengangguran pada sumbu horizontal, dan perubahan persentase dalam GDP riil pada sumbu vertikal. Gambar ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar pengamatan yang berslope negatif (Mankiw, 2007).

2.1.10 Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pengangguran

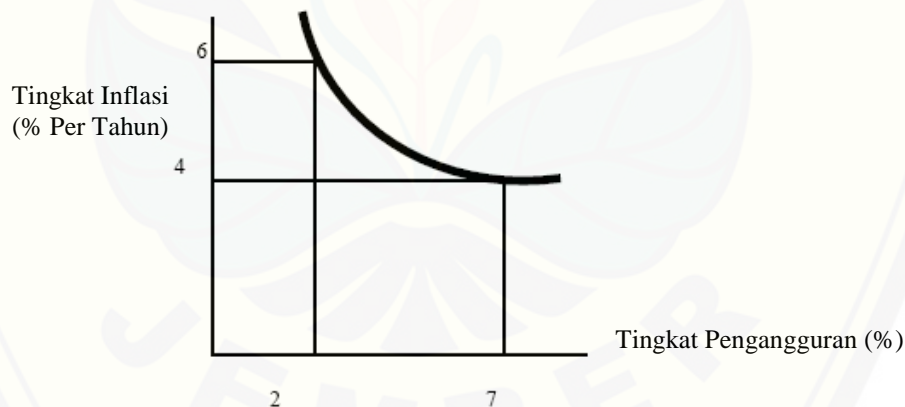
Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotchkiss dalam Alghofari (2010), Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah

tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson dalam Alghofari (2010), menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.

2.1.11 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Teori yang signifikan dalam menjelaskan sebab akibat inflasi adalah Kurva Phillips, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.7 Kurva Philip. (Sumber: Salvatore 2007)

Berdasarkan gambar 2.7 Kurva Philips tersebut menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya

dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang atau bisa dilihat pula dengan tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku bunga yang secara langsung kemudian akan memicu banyaknya permintaan atas kredit usaha dan akan banyak industri atau sektor usaha yang bermunculan, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat seiring kesempatan kerja yang tinggi (Salvatore 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Roby Cahyadi Kurniawan (2013), dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011". Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,01$. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil pengujian pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,09 < 0,10$. Hal tersebut menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil pengujian pengaruh Inflasi terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,078 < 0,10$. Hal menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Yeny Dharmayanti (2011), meneliti tentang "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009" Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan

pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah, Inflasi dan Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2009. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran. Hasil pengujian pengaruh Upah terhadap pengangguran diperoleh bahwa Upah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Hasil pengujian pengaruh Inflasi terhadap pengangguran berarti bahwa inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengangguran dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah dan Inflasi secara bersama-sama.

Dania Safia Safitri (2011), meneliti tentang "Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009" Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Koefisien Determinasi (R²). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, sedangkan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel inflasi dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

Fajar Wahyu Utomo (2013) dengan judul "Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia periode tahun 1980-2010" dan hasilnya berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen yaitu variabel upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia selama periode tahun 1980-2010 dan variabel inflasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap pengangguran. Inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi akan menghambat perekonomian Indonesia.

Anggun Kembar Sari (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.

Nirmala Mansur, Daisy Engka, dan Steeva Tumangkeng (2014) dengan judul “Analisis Upah Terhadap Pengangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa upah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado. Variabel upah dapat disimpulkan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

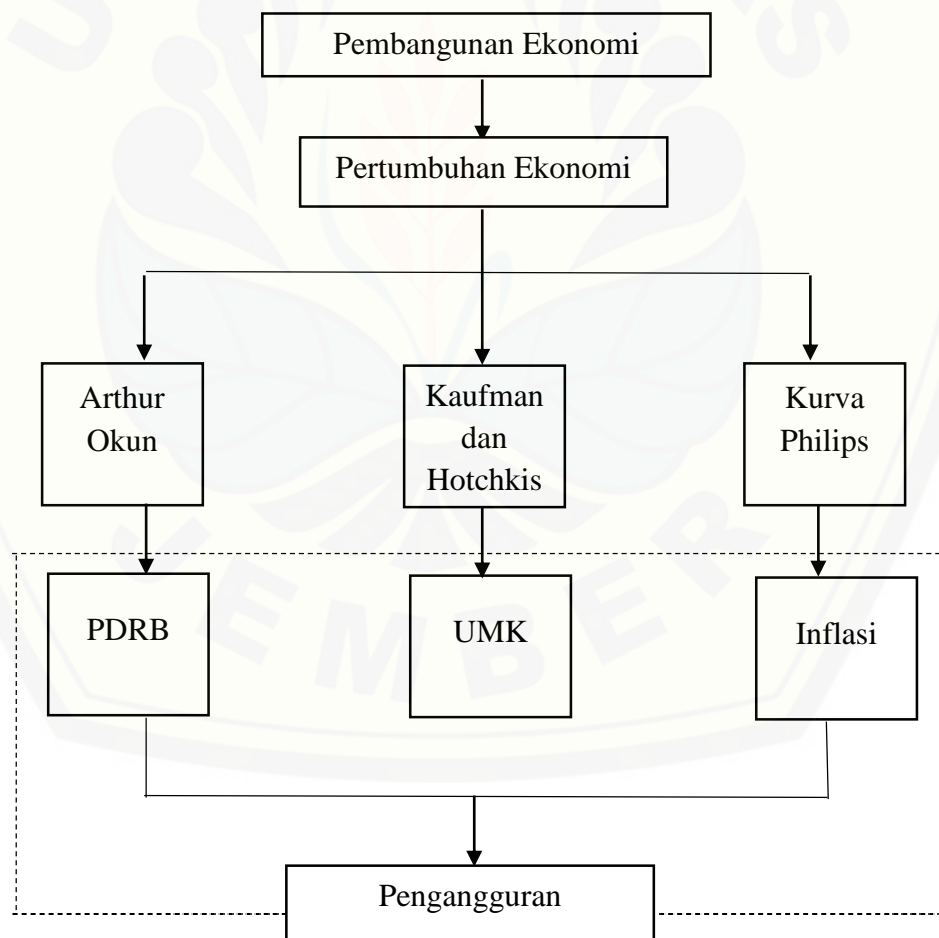
No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Roby Cahyadi Kurniawan (2013)	Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka. - UMK berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka. - Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka.

2	Yeny Dharmayanti (2011)	Analisis Pengaruh PDRB, Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa tengah Tahun 1991- 2009	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran. - Upah berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. - Inflasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. - Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengangguran dapat dipengaruhi oleh PDRB, Upah dan Inflasi secara bersama-sama.
3	Dania Safia Safitri (2011)	Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993 -2009	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka. - PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. - Secara bersama-sama variabel infasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.
4	Fajar Wahyu Utomo (2013)	Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia periode tahun 1980-2010	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. - Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
5	Anggun Kembar Sari (2013)	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. - Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. - Upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.

6	Nirmala Mansur, Daisy Engka, dan Steeva Tumangkeng (2014)	Analisis Upah Terhadap Pengangguran Di Kota Manado Tahun 2003-2012	Metode Regresi Linear Sederhana	- Upah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran di Kota Manado.
---	---	--	---------------------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan alur berfikir secara konseptual, terfokus pada tujuan dilaksanakannya penelitian, kerangka konseptual dapat diturunkan baik dari teori-teori yang mendasari penelitian, kemudian diturunkan kedalam variabel-variabel yang terkait dengan penelitian kemudian dirumuskan alur berfikir secara konseptual yang dilakukan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.8 berikut ini :



Gambar 2.8 kerangka konseptual

Pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diikuti dengan perubahan kondisi ekonomi seperti adanya perubahan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK, dan inflasi yang dapat mempengaruhi pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDB akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di wilayah sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, adanya peningkatan persentase akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi dalam pembangunan, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran dapat berkurang.

Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Salvatore (2007) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Dalam Kurva Philips dijelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau suatu dugaan, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri selama periode tahun 1990-2015;
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri selama periode tahun 1990-2015;
- c. Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri selama periode tahun 1990-2015

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hipotesa atau penelitian penjelasan atau disebut juga explanatory research yaitu metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat (Singarimbun, 1995). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), UMK, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), UMK, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang meliputi kurun waktu tahun 1990-2015 tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan inflasi. Ruang lingkup data yang digunakan adalah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013). Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian yang utama untuk mengetahui

hubungan antara variabel penelitian. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi atau gambaran dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum serta standar deviasi atas variabel-variabel penelitian.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan metode ordinal least square (OLS). Metode regresi ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh antara Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), UMK, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri pada tahun 2006 sampai 2015.

Model ekonometrika persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Tingkat Pengangguran Terbuka
X ₁	= Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)
X ₂	= UMK
X ₃	= Inflasi
β ₀	= Konstanta
β ₁	= Koefisien Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)
β ₂	= Koefisien UMK
β ₃	= Koefisien Inflasi
e	= variabel pengganggu

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel tidak terikat (*independen*). Tidak terjadinya korelasi diantara variabel tidak terikat (*independen*) mencerminkan modal regresi yang baik (Ghozali, 2013). Apabila nilai *Tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan *VIF* ≥ 10 maka dapat diartikan terjadi multikolinieritas. Namun

apabila nilai $Tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Uji heteroskedastisitas dapat digunakan *uji white*.

Kriteria pengujian uji *White Heteroskedastisity Test* adalah:

- a) Nilai χ^2 hitung (Obs*R-squared) > nilai χ^2 tabel (Obs*R-squared) atau nilai probabilitas χ^2 hitung (Prob. Chi-Square) < nilai probabilitas ($\alpha=0,1$), maka terjadi adanya heteroskedastisitas.
- b) Nilai χ^2 hitung (Obs*R-squared) < nilai χ^2 tabel (Obs*R-squared) atau nilai probabilitas χ^2 hitung (Prob. Chi-Square) > nilai probabilitas ($\alpha=0,1$), maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu alat uji ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi digunakan uji *run test*. uji ini dipergunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Residual regresi diolah dengan uji *run test*, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) yang dipergunakan. Apabila nilai hasil uji *run test* lebih besar daripada tingkat signifikansi (α), maka tidak terdapat masalah otokorelasi pada data yang diuji. (Utomo, 2007)

3.5.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati

normal. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam pengujian normalitas data penelitian. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah pengujian normalitas data dengan cara membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Pengambilan keputusan atas pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,1$ maka tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi terdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,1$ maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi tidak terdistribusi normal.

3.6 Uji Statistika

3.6.1 Uji F (Uji Secara Serentak)

Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), UMK, dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Menurut Gujarati (2003) adalah formula uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

- F = Pengujian secara bersama-sama
 R² = Koefisien determinasi berganda
 K = Banyaknya variabel bebas
 N = Banyaknya sampel
 k-1 = derajat bebas pembilang
 n-k = derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis disusun sebagai berikut:

- a. $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

- b. $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

Kriteria pengujian :

- 1) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,1$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.
- 2) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,1$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3), secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

3.6.2 Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian secara parsial adalah bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling besar atau paling signifikan terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003).

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

T_{hitung} = pengujian secara parsial

b_i = koefisien regresi

$Se(b_i)$ = Standart deviasi

Perumusan hipotesis sebagai berikut :

- a. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3), terhadap tingkat pengangguran terbuka;

- b. $H_0 \neq \beta_1 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3), terhadap tingkat pengangguran terbuka;

Kriteria pengujian :

- 1) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,1$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- 2) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,1$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya akan digunakan analisis koefisien determinasi berganda dan dengan semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin tepat model regresi yang digunakan sebagai alat uji dalam penelitian ini. Adapun rumus yang digunakan adalah (Gujarati, 2003).

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi berganda

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = Jumlah kuadrat yang residual

TSS = Jumlah kuadrat total (ESS+RSS)

Kriteria pengujian :

- a. Apabila nilai R^2 hampir mendekati 1, maka pengaruh variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) besar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

- b. Apabila nilai R^2 hampir mendekati 0, maka tidak ada pengaruh variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (X1), UMK (X2), dan inflasi (X3) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri.

3.7 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan istilah yang digunakan penelitian dan menghindari meluasnya permasalahan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dalam penelitian ini tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri pada tahun 1990-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2017);
- b. Pendapatan Daerah Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan semua unit produksi di suatu wilayah, dalam penelitian ini Pendapatan Daerah Regional Bruto di Kabupaten Kediri pada tahun 1990-2015 yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Badan Pusat Statistik, 2017);
- c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, dalam penelitian ini Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Kediri pada tahun 1990-2015 yang dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan (Badan Pusat Statistik, 2017);
- d. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, dalam penelitian ini di Kabupaten Kediri pada tahun 1990-2015 yang dinyatakan dalam satuan persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2017).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat dikurangi dengan cara menaikkan PDRB.
2. UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat dikurangi dengan cara menaikkan UMK.
3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat dikurangi dengan cara menaikkan inflasi.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, instansi pendidikan, maupun pihak lain. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Dengan pengaruh ini maka pemerintah baiknya melakukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan PDRB di berbagai sektor terutama sektor yang bersifat padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
2. UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Dengan pengaruh ini maka baiknya pemerintah berusaha untuk menaikkan upah minimum secara bertahap agar para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini pemerintah harus mengontrol

tingkat inflasi pada tingkat yang memudahkan untuk iklim investasi sehingga akan membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.



DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, F. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 - 2007. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Universitas Diponegoro*.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima. Yogyakarta: Upp STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). <http://www.bps.go.id/>. [Diakses pada tanggal 10 April 2017].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. 1994. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 1997. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 1999. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 2002. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 2004. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 2006. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 2015. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2015*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- , 2016. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2016*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- Boediono. 2005. *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada.
- , 2013. *Ekonomi Makro*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada.
- Deliarnov, 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : III press

- Dharmayanti, Y. 2011. Analisis pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Upah, dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2009. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: PT Erlangga.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, G. 2007. *Prinsiple of Economics*. Terjemahan oleh F. Liza. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mansur, N., Engka, D., dan Tumangkeng, S. 2014. Analisis Upah Terhadap Pengangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*.
- Kurniawan, R. C. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), UMK, dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Malang tahun 1980-2011. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya*.
- Safitri, D.S. 2011. Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Salvatore, D. 2007. *Mikroekonomi*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Sari, A. K. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Simanjuntak, P. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya manusia*. Jakarta : FEUI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Subagiarta, I. W. 2012. *Sumber Daya Manusia II*. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sukirno, S. 2002. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- . 2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- , 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suparmoko dan Icuk Rangga Bawana. 2007. *Ekonomi 2*. Jakarta: Penerbit Yudhistira.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tarigan, R. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Utomo, Y.P. 2007. *Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Utomo, F.W. 2013. Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran di Indonesia periode tahun 1980-2010. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Widodo, S.T. 1990. *Indikator Ekonomi dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Lampiran A. Rekapitulasi Data

TAHUN	PDRB	UMK	INFLASI	TPT
1990	9013552,52	42270	9,21	17,53
1991	9050738,72	42270	10,54	16,12
1992	9109856,93	66000	7,61	15,93
1993	9114840,12	66000	8,45	15,04
1994	9214642,38	88500	8,93	14,73
1995	9265595,26	103000	15,53	14,11
1996	9352741,09	108000	16,12	13,93
1997	9415901,72	127500	16,04	12,64
1998	9415188,36	146500	60,93	13,42
1999	9429223,27	174000	14,73	10,86
2000	14334445,33	212000	14,11	8,74
2001	14410548,86	275000	13,93	7,45
2002	14601985,84	361250	12,64	2,91
2003	14620756,38	415000	13,42	4,55
2004	15102408,67	477000	10,86	4,58
2005	15834029,84	501000	8,74	7,57
2006	15971920,52	579000	7,45	8,02
2007	16022911,45	654000	2,91	8,89
2008	16998231,16	717000	4,55	7,79
2009	17895970,33	856000	4,58	5,11
2010	18254460,84	871000	7,57	3,75
2011	19354905,21	935000	8,02	8,33
2012	20538322,72	999000	4,23	4,08
2013	21733457,59	1089950	5,01	4,65
2014	22889974,23	1135000	4,98	4,91
2015	24006227,98	1305250	4,73	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2017

Lampiran B. Statistik Deskriptif

TAHUN	PDRB (X1)	UMK (X2)	INFLASI (X3)	TPT (X4)
1990	9013552,52	42270	9,21	17,53
1991	9050738,72	42270	10,54	16,12
1992	9109856,93	66000	7,61	15,93
1993	9114840,12	66000	8,45	15,04
1994	9214642,38	88500	8,93	14,73
1995	9265595,26	103000	15,53	14,11
1996	9352741,09	108000	16,12	13,93
1997	9415901,72	127500	16,04	12,64
1998	9415188,36	146500	60,93	13,42
1999	9429223,27	174000	14,73	10,86
2000	14334445,33	212000	14,11	8,74
2001	14410548,86	275000	13,93	7,45
2002	14601985,84	361250	12,64	2,91
2003	14620756,38	415000	13,42	4,55
2004	15102408,67	477000	10,86	4,58
2005	15834029,84	501000	8,74	7,57
2006	15971920,52	579000	7,45	8,02
2007	16022911,45	654000	2,91	8,89
2008	16998231,16	717000	4,55	7,79
2009	17895970,33	856000	4,58	5,11
2010	18254460,84	871000	7,57	3,75
2011	19354905,21	935000	8,02	8,33
2012	20538322,72	999000	4,23	4,08
2013	21733457,59	1089950	5,01	4,65
2014	22889974,23	1135000	4,98	4,91
2015	24006227,98	1305250	4,73	5,02
MEAN	14421262,97	474865	11,37769	9,256154
MIN	9013552,52	42270	2,91	2,91
MAX	24006227,98	1305250	60,93	17,53
STD.DEV	4852237,613	398489	10,90276	4,595523

Lampiran C. Analisis Regresi Linier Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,709	,669	2,64195

a. Predictors: (Constant), INFLASI, PDRB, UMK

b. Dependent Variable: TPT

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	457,786	3	152,595	47,832	,000 ^b
	Residual	70,185	22	3,190		
	Total	527,971	25			

a. Dependent Variable: TPT

b. Predictors: (Constant), INFLASI, PDRB, UMK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	81,139	11,120		7,296	,000		
	PDRB	-3,092	1,821	-,170	-1,698	,096	,601	1,664
	UMK	-8,717	1,091	-,911	-7,991	,000	,465	2,153
	INFLASI	-,209	,098	-,201	-2,134	,044	,684	1,462

a. Dependent Variable: TPT

Lampiran D. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,47837042
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,069
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	81,139	11,120		7,296	,000		
	PDRB	-3,092	1,821	-,170	-1,698	,096	,601	1,664
	UMK	-8,717	1,091	-,911	-7,991	,000	,465	2,153
	INFLASI	-,209	,098	-,201	-2,134	,044	,684	1,462

a. Dependent Variable: TPT

c. Uji Heteroskedastisitas**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	650,000 ^a	625	,237
Likelihood Ratio	169,421	625	1,000
Linear-by-Linear Association	2,205	1	,138
N of Valid Cases	26		

a. 676 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04.

d. Uji Autokorelasi**Runs Test**

	RES2
Test Value ^a	1,77
Cases < Test Value	13
Cases >= Test Value	13
Total Cases	26
Number of Runs	13
Z	-,200
Asymp. Sig. (2-tailed)	,841

a. Median

Lampiran E. Uji Hipotesis

a. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	81,139	11,120		7,296	,000
	PDRB	-3,092	1,821	-,170	-1,698	,096
	UMK	-8,717	1,091	-,911	-7,991	,000
	INFLASI	-,209	,098	-,201	-2,134	,044

a. Dependent Variable: TPT

b. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	457,786	3	152,595	47,832	,000 ^b
	Residual	70,185	22	3,190		
	Total	527,971	25			

a. Dependent Variable: TPT

b. Predictors: (Constant), INFLASI, PDRB, UMK

c. Koefisienan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,709	,669	2,64195

a. Predictors: (Constant), INFLASI, PDRB, UMK

b. Dependent Variable: TPT